

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

A.1. Gambaran Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota, yang meliputi 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, dengan memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, Makassar, dan Toraja. Luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km² dengan Jumlah Penduduk 8.214.779 Jiwa dengan Kepadatan Penduduk 175,84 Jiwa/km². Letak Wilayah Sulawesi Selatan 0°12' – 8' Lintang Selatan dan 116°48' – 122°36' Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Sebelah Barat Selat Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores.

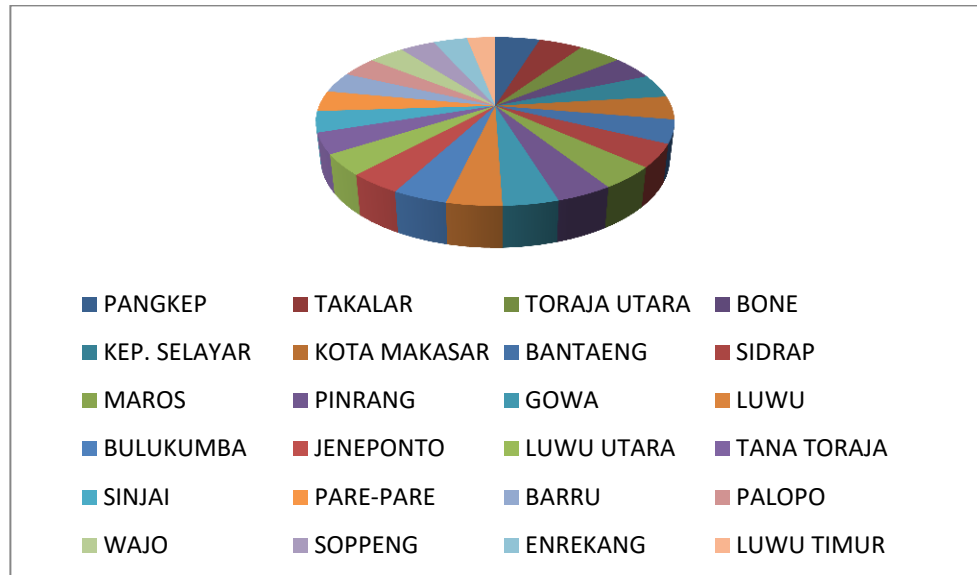
Dalam penelitian ini, obyek yang digunakan adalah pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Jenis data yang digunakan adalah berupa data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Belanja Modal yang diakses

melalui situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui internet dan Biro Pusat Statistik (BPS). Berikut ini adalah grafik data Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016:

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi
PANGKEP	4,8
TAKALAR	4,7
TORAJA UTARA	4,6
BONE	4,5
KEP. SELAYAR	4,5
KOTA MAKASAR	4,5
BANTAENG	4,5
SIDRAP	4,4
MAROS	4,4
PINRANG	4,3
GOWA	4,3
LUWU	4,2
BULUKUMBA	4,2
JENEPONTO	4,0
LUWU UTARA	4,0
TANA TORAJA	4,0
SINJAI	4,0
PARE-PARE	3,9
BARRU	3,9
PALOPO	3,9
WAJO	3,8
SOPPENG	3,7
ENREKANG	3,7
LUWU TIMUR	3,1

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)

Gambar 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

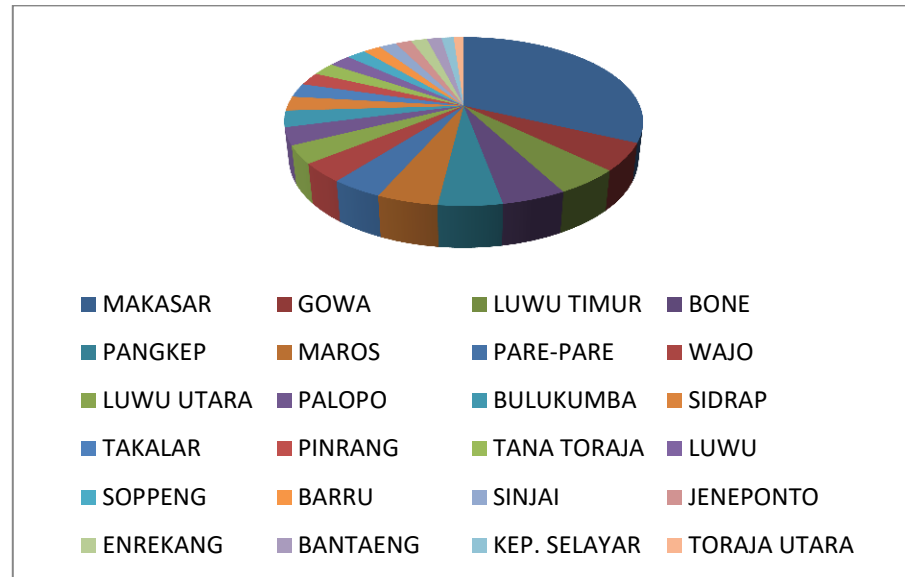
Dari data pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa kabupaten Pangkep memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 4,8% dari jumlah pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016. Dimana pada tahun 2012 menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 8,26%, 2013 9,33%, 2014 10,41%, 2015 7,96% dan 2016 8,24%. Hal ini disebabkan karna Kabupaten Pangkep merupakan daerah penghasil jeruk pamele terbesar di Sulawesi Selatan yang kemudian dijadikan sebagai bahan dasar pengolahan dodol, sirup dan permen. selain daripada itu, Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten yang memiliki rata-rata pertumbuhan Ekonomi terendah sebesar 3,1% dari jumlah pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016. Dimana pada tahun 2012 menunjukkan

angka pertumbuhan ekonomi luwu timur sebesar 5,62%, 2013 6,3%, 2014 8,1%, 2015 6,43% dan 2016 8,1%.

Tabel 4.2
PAD Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

KABUPATEN/KOTA	PAD
MAKASAR	31,9
GOWA	5,3
LUWU TIMUR	5,0
BONE	4,9
PANGKEP	4,9
MAROS	4,7
PARE-PARE	3,9
WAJO	3,6
LUWU UTARA	3,4
PALOPO	3,3
BULUKUMBA	3,1
SIDRAP	2,7
TAKALAR	2,7
PINRANG	2,5
TANA TORAJA	2,5
LUWU	2,4
SOPPENG	2,1
BARRU	1,9
SINJAI	1,8
JENEPONTO	1,7
ENREKANG	1,7
BANTAENG	1,6
KEP. SELAYAR	1,3
TORAJA UTARA	1,1

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)

Gambar 4.2
PAD Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

Dari data PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa Kota Makassar memiliki rata-rata PAD tertinggi sebesar 31,9% dari jumlah PAD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016. Dimana pada tahun 2012 jumlah PAD Kota Makassar sebesar Rp. 487.897.396.000 2013 sebesar Rp. 609.655.622.000 2014 sebesar Rp. 731.170.425.000 2015 sebesar Rp. 828.871.893.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.305.180.008.000. Hal ini dapat disebabkan karena Kota Makassar selain menjadi Ibukota Provinsi juga merupakan pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di Sulawesi

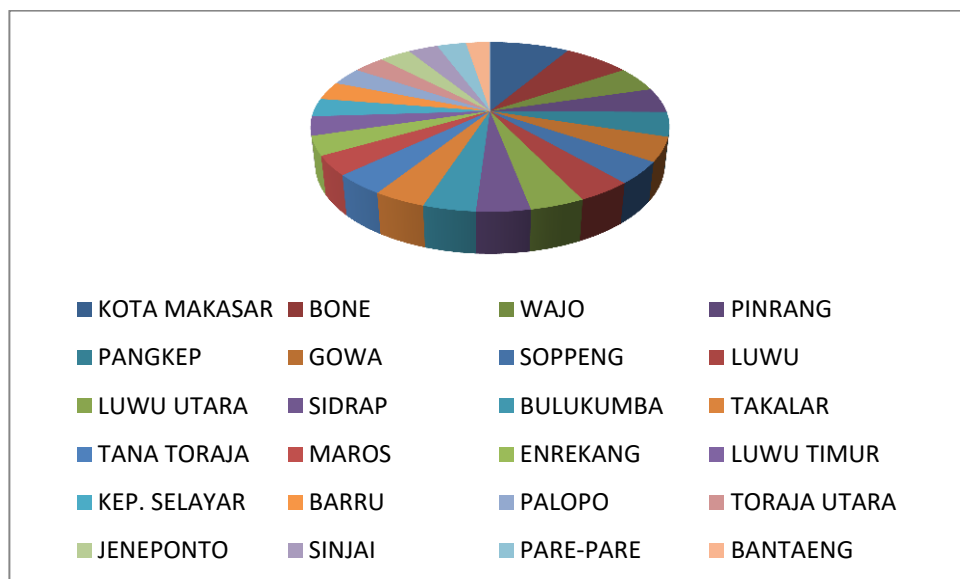
Selatan. Selain daripada itu, Kabupaten Toraja Utara merupakan Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki rata-rata PAD terendah di Sulawesi Selatan dalam rentang waktu selama 5 tahun dari tahun 2012-2016. Dimana pada tahun 2012 jumlah PAD Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp. 16.512.051.000 2013 sebesar Rp. 19.824.777.000 2014 sebesar Rp. 25.284.959.000 2015 sebesar Rp. 33.808.407.000 dan tahun 2016 sebesar Rp. 41.384.041.000.

Tabel 4.3
DAU Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

KABUPATEN/KOTA	DAU
KOTA MAKASAR	8,6
BONE	7,1
WAJO	4,8
PINRANG	4,7
PANGKEP	4,6
GOWA	4,6
SOPPENG	4,2
LUWU	4,2
LUWU UTARA	4,2
SIDRAP	4,1
BULUKUMBA	4,0
TAKALAR	4,0
TANA TORAJA	4,0
MAROS	3,7
ENREKANG	3,6
LUWU TIMUR	3,6
KEP. SELAYAR	3,5
BARRU	3,5
PALOPO	3,4
TORAJA UTARA	3,4
JENEPONTO	3,4

KABUPATEN/KOTA	DAU
SINJAI	3,2
PARE-PARE	3,1
BANTAENG	2,6

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)

Gambar 4.3
DAU Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

Dari data DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa Kota Makassar memiliki rata-rata DAU tertinggi sebesar 8,6% dari jumlah DAU Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016. Dimana pada tahun 2012 DAU kota Makassar sebesar Rp. 911.122.797.000 2013 sebesar Rp. 1.033.584.903.000 2014 sebesar Rp. 1.114.853.212.000 2015 sebesar Rp. 1.198.866.380.000 dan 2016 sebesar Rp. 1.324.023.135.000. Selain daripada

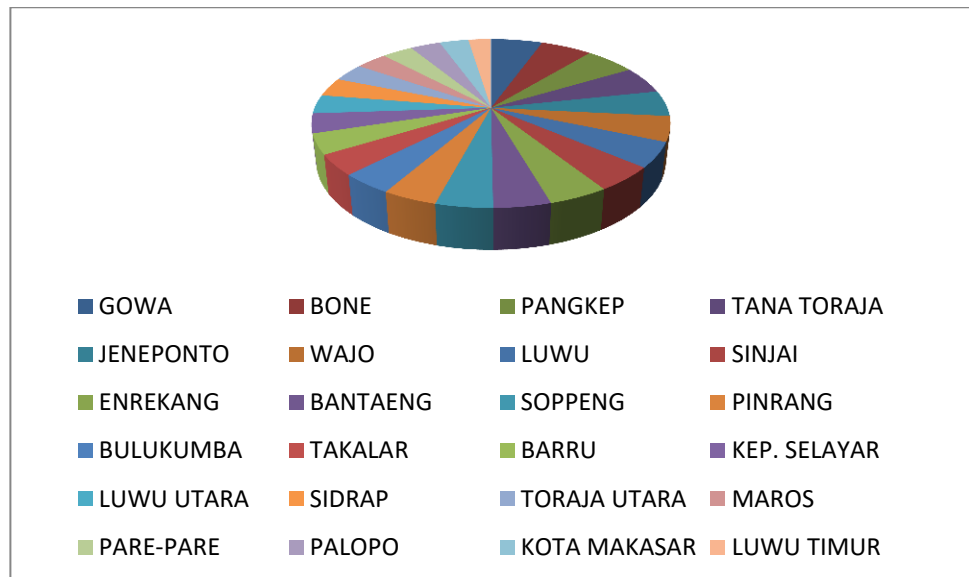
itu, Kabupaten Bantaeng merupakan Kabupaten yang menerima DAU terendah diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebesar 2,6% dari total rata-rata penerimaan DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016. Dimana pada tahun 2012 DAU Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 325.057.232.000 2013 sebesar Rp. 379.463.356.000 2014 sebesar Rp. 47.287.960.000 2015 sebesar Rp. 444.919.431.000 dan pada tahun 2016 Rp. 497.449.000.000.

Tabel 4.4
DAK Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

KABUPATEN/KOTA	DAK
GOWA	5,5
BONE	5,5
PANGKEP	5,4
TANA TORAJA	5,2
JENEPONTO	4,9
WAJO	4,8
LUWU	4,8
SINJAI	4,7
ENREKANG	4,6
BANTAENG	4,4
SOPPENG	4,3
PINRANG	4,2
BULUKUMBA	4,0
TAKALAR	4,0
BARRU	3,9
KEP. SELAYAR	3,7
LUWU UTARA	3,6
SIDRAP	3,6
TORAJA UTARA	3,5

KABUPATEN/KOTA	DAK
MAROS	3,4
PARE-PARE	3,3
PALOPO	3,2
KOTA MAKASAR	3,1
LUWU TIMUR	2,4

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)

Gambar 4.4
DAK Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

Dari data DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa Kabupaten Gowa memiliki rata-rata DAU tertinggi sebesar 5,5% dari jumlah DAK Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016. Dimana pada tahun 2012 DAK Kabupaten Gowa sebesar Rp.54.785.160.000 tahun 2013 sebesar Rp. 67.662.600.000 tahun 2014 sebesar Rp. 80.227.530.000 tahun 2015 sebesar

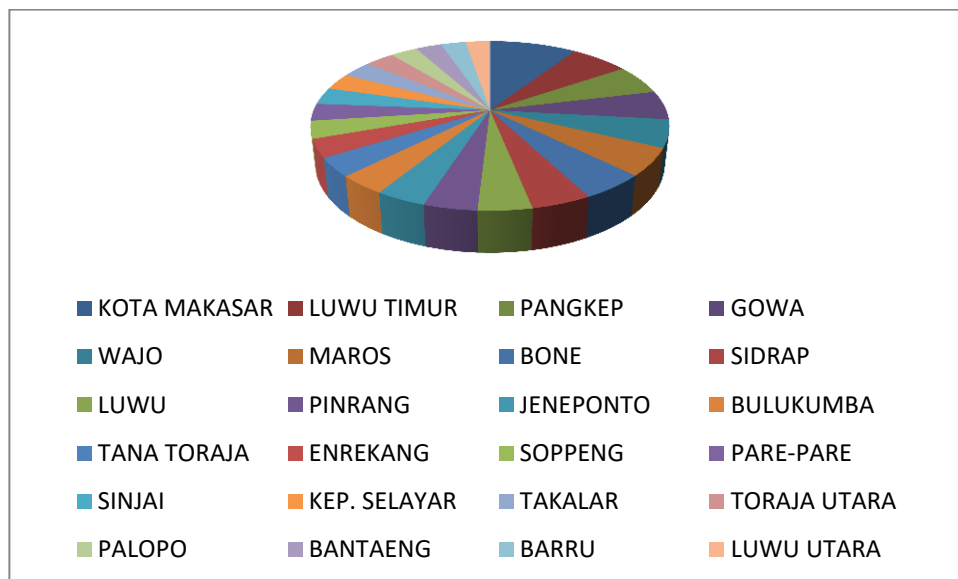
Rp. 138.951.270.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 418.314.381.000. Selain daripada itu, Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten yang menerima DAK terendah diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebesar 2,4% dari total rata-rata penerimaan DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016. Dimana pada tahun 2012 DAK Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 43.516.120.000 tahun 2013 sebesar Rp. 38.909.600.000 tahun 2014 sebesar Rp. 55.595.030.000 tahun 2015 sebesar Rp. 80.128.930.000 dan tahun 2016 sebesar Rp. 115.749.030.000.

Tabel 4.5
Belanja Modal Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

KABUPATEN/KOTA	Belanja Modal
KOTA MAKASAR	9,4
LUWU TIMUR	6,2
PANGKEP	5,7
GOWA	5,5
WAJO	5,3
MAROS	5,3
BONE	5,0
SIDRAP	4,6
LUWU	4,1
PINRANG	4,1
JENEPONTO	3,9
BULUKUMBA	3,7
TANA TORAJA	3,6
ENREKANG	3,5
SOPPENG	3,3

KABUPATEN/KOTA	Belanja Modal
PARE-PARE	3,3
SINJAI	3,2
KEP. SELAYAR	3,2
TAKALAR	3,2
TORAJA UTARA	3,1
PALOPO	2,9
BANTAENG	2,8
BARRU	2,7
LUWU UTARA	2,6

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah kembali)

Gambar 4.5
Belanja Modal Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

Dari data Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa Kota Makassar memiliki rata-rata Belanja Modal tertinggi sebesar 9,4% dari jumlah Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016. Dimana

pada tahun 2012 Belanja Modal Kota Makassar sebesar Rp. 318.618.379.000 tahun 2013 sebesar Rp.234.686.243.000 tahun 2014 sebesar Rp. 463.260.545.000 tahun 2015 sebesar Rp. 673.026.826.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 775.719.638.000. Selain daripada itu, Kabupaten Luwu Utara merupakan Kabupaten yang memiliki Belanja Modal terendah diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebesar 2,6% dari total rata-rata penerimaan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016. Dimana pada tahun 2012 Belanja Modal Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 228.945.562.000 tahun 2013 sebesar Rp. 132.303.589.000 tahun 2014 sebesar Rp. 112.280.864.000 tahun 2015 sebesar Rp. 16.302.283.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 199.310.427.000.

A.2. Statistik Deskriptif

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung saat ini atau di waktu lampau. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu variabel yang akan diteliti di dalam suatu situasi/kondisi agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Berikut ini merupakan uji statistik deksriptif :

Tabel 4.6
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	120	23.11	27.38	25.8776	.76515
Pertumbuhan Ekonomi	120	.48	2.41	2.0175	.20912
Pendapatan Asli Daerah	120	24.58	27.91	26.9200	.53372
Dana Alokasi Umum	120	22.15	26.76	25.1899	.74366
Dana Alokasi Khusus	120	18.83	27.90	24.8815	.97594
Valid N (listwise)	120				

Dari tabel 4.1 hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa seluruh variable penelitian ini menggunakan 120 sampel. Pada variable belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 23,11 dan maksimum 27,38. Dengan rata-rata 25,87 dan nilai standard deviasi 0,76. Sesuai dengan tabel 4.5 dan gambar 4.5 menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki belanja modal tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 9,4 dan Luwu Utara memiliki belanja modal paling rendah dengan nilai rata-rata sebesar 2,6 diantara Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dalam rentang waktu 2012-2016. Pada variabel selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi dengan nilai minimum sebesar 0,48 dan nilai maksimum 2,41. Dengan rata-rata 2,01 dan nilai standard deviasinya 0,20. Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 menjelaskan bahwa Kabupaten Pangkep memiliki nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,8 dan Luwu Timur memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah dengan nilai sebesar 3,1 diantara

Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan dalam rentang waktu tahun 2012-2016. Pada variable pendapatan asli daerah menunjukkan nilai minimum 24,58 dan nilai maksimum sebesar 27,91. Dengan rata-rata 26,92 serta nilai standard deviasi sebesar 0,53. Sesuai dengan tabel 4.2 dan gambar 4.2 menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki PAD tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 31,9 dan Toraja Utara memiliki PAD terendah dengan nilai rata-rata sebesar 1,1 diantara Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan selama rentang waktu 2012-2016. Pada variable dana alokasi umum memiliki nilai minimum sebesar 22,15 dan nilai maksimumnya sebesar 26,76. Dengan rata-rata sebesar 25,18 dan nilai standard deviasinya sebesar 0,74. Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.3 menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki nilai rata-rata DAU tertinggi dengan nilai 8,6 dan Bantaeng memiliki DAU terendah dengan nilai 2,6 diantara Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan dalam rentang waktu 2012-2016. Variabel yang terakhir adalah dana alokasi khusus terdapat nilai minimum sebesar 18,83 dan nilai maksimum sebesar 27,90. Dengan nilai rata-rata menunjukkan 24,88 dengan standard deviasi sebesar 0,97. Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.4 menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa memiliki DAK tertinggi dengan nilai rata-rata 5,5 dan Luwu Timur memiliki DAK terendah dengan nilai rata-rata sebesar 2,4 diantara Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan dalam rentang waktu 2012-2016.

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Normalitas

Menurut Darma & Basuki (2015) uji normalitas berguna untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan uji statistik normalitas Kolmogorov Smirnov. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov smirnov dapat dilihat dari nilai signifikansi dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku.
- 2) Jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.

Tabel 4.7
Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0583333
	Std. Deviation	.46651533
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.104
	Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		1.309
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Pada tabel 4.2 uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* dari 120 sampel menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,065 lebih besar dari 0,05, maka dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Darma & Basuki (2015) Multikolinieritas adalah adanya hubungan linear antara sesama variabel independen. Jika hubungan linear antara sesama peubah X tersebut adalah korelasi sempurna maka peubah-peubah tersebut berkolinieritas ganda sempurna (*perfect multicollinearity*). Pendeteksian multikolinieritas dapat dilihat melalui Variance Inflation Factors (VIF) atau nilai Tolerance, karena $VIF = 1/Tolerance$. Kriteria pengujian yaitu apabila nilai $VIF < 10$ atau nilai $Tolerance > 0,1$ maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
(Constant)	6.586	3.450		
Pertumbuhan Ekonomi	-.364	.290	.979	1.021
Pendapatan Asli Daerah	.319	.119	.891	1.122
Dana Alokasi Umum	.425	.085	.902	1.109
Dana Alokasi Khusus	.030	.062	.966	1.035

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Pada tabel 4.3 hasil uji multikolinearitas diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF pada variabel pertumbuhan ekonomi adalah $1,021 < 10$ serta nilai *tolerance* $0,979 > 0,1$. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai VIF $1,122 < 10$ serta nilai *tolerance* $0,891 > 0,1$. Variabel dana alokasi umum memiliki nilai VIF sebesar $1,109 < 10$ dan nilai *tolerance* $0,902 > 0,01$. Variabel dana alokasi khusus memiliki nilai VIF sebesar $1,035 < 10$ dan nilai *tolerance* sebesar $0,966 > 0,01$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen terhadap variabel dependen tidak bias.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Darma & Basuki (2015) uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Untuk

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi pada sebuah penelitian, maka dilakukan pengukuran dengan metode Darbin-Watson (DW) dengan ketentuan bahwa tidak terjadi autokorelasi jika DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$. Berikut adalah hasil uji autokorelasi :

Tabel 4.9
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.543 ^a	.295	.270	.65360	1.781

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan nilai DW 1,781 yang berada diantara -2 dan +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam pengujian ini tidak terjadi autorelasi.

4. Uji Heterosdastisitas

Menurut Darma & Basuki (2015) uji heteroskedastisitas adalah pengujian adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji *Glejser* dengan cara meregresi nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel-variabel penjelas. Berdasarkan uji *Glejser* dikatakan terdapat heteroskedastisitas apabila probabilitas $Obs * R\text{-square} < 0,05$

(dengan tingkat kepercayaan 5%), sedangkan pengujian yang dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas Obs* R-square > 0,05.

Berikut adalah tabel hasil pengujian heterosdastisitas :

Tabel 4.10
Uji Heterosdastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.810	1.675		2.275	.025
Pertumbuhan Ekonomi	-.127	.141	-.082	-.904	.368
1 Pendapatan Asli Daerah	-.091	.058	-.150	-1.584	.116
Dana Alokasi Umum	-.075	.041	-.172	-1.832	.070
Dana Alokasi Khusus	.045	.030	.135	1.486	.140

a. Dependent Variable: ABS_RES

Pada tabel 4.5 uji heteroskedastisitas diatas dapat dilihat nilai sig pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,368 > 0,05, variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai sig 0,116 > 0,05, variabel dana alokasi umum memiliki nilai sig sebesar 0,070 > 0,05 dan variabel dana alokasi khusus memiliki nilai sig sebesar 0,140 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas atau tidak terdapat penyimpangan dari beberapa syarat uji kualitas data.

C. Uji Hipotesis dan Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi Berganda. Metode analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program SPSS 21.0. pengujian hipotesis ini meliputi tiga bagian yaitu nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*), nilai statistik F dan nilai statistik t.

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Dari tabel 4.6 dibawah ini merupakan hasil uji koefisiensi determinasi (*Adjusted R²*) menunjukkan nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,270 atau sama dengan 27 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan sebesar 27% oleh variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan sisanya yang sebesar 73% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berikut adalah tabel hasil pengujian koefisiensi determinasi (*Adjusted R²*):

Tabel 4.11
Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.543 ^a	.295	.270	.65360

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

2. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0.05 ($\alpha = 5\%$).

Berikut adalah hasil pengujian secara simultan (Uji F) :

Tabel 4.12
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	20.541	4	5.135	12.021	.000 ^b
Residual	49.128	115	.427		
Total	69.669	119			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel 4.7 diatas menunjukkan nilai F sebesar 12,021 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

secara simultan berkontribusi terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang mengatakan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berkontribusi positif terhadap belanja modal terdukung.

3. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil Uji t terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Uji t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.586	3.450		1.909	.059
Pertumbuhan Ekonomi	-.364	.290	-.099	-1.256	.212
Pendapatan Asli Daerah	.319	.119	.223	2.683	.008
Dana Alokasi Umum	.425	.085	.413	5.006	.000
Dana Alokasi Khusus	.030	.062	.038	.473	.637

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Persamaan regresi berganda di dalam penelitian ini adalah:

$$\mathbf{BM = 6,586 - 0,364PE + 0,319 PAD + 0,425 DAU + 0,030 DAK + e}$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian :

1. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai koefisien regresi yang berarah negatif sebesar -0,364 dengan signifikansi sebesar 0,212 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berkontribusi terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi positif terhadap belanja modal tidak terdukung.

2. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,319 dengan signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berkontribusi positif terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berkontribusi positif terhadap belanja modal terdukung.

3. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0,425 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berkontribusi positif terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang mengatakan dana alokasi umum berkontribusi positif terhadap belanja modal terdukung.

4. Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai koefisiensi regresi yang arahnya positif sebesar 0,030 dengan signifikansi sebesar $0,637 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berkontribusi terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) yang mengatakan dana alokasi khusus berkontribusi positif terhadap belanja modal tidak terdukung.

D. Pembahasan

1. Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai koefisien regresi yang berarah negatif sebesar $-0,364$ dengan signifikansi sebesar $0,212 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berkontribusi terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dapat dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah maka semakin tinggi pula upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di daerahnya dan semakin tinggi aktivitas ekonomi maka semakin tinggi pula belanja modal yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna pembangunan pos-pos layanan publik dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi itu sendiri. Akan tetapi dari hasil uji regresi berganda terpantau dari tabel 4.8

disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berkontribusi terhadap belanja modal.

Hal ini dapat disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dana langsung kepada daerah. Pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan kondisi perekonomian daerah dan tidak memberikan pemasukan terhadap daerah secara langsung. Pertumbuhan ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan Wildaniati (2016) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2017) juga menyimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suryanto (2015) yang menyimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan

Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD sebagai sumber penerimaan daerah harus selalu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan demi meujudkan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai koefisiensi regresi yang arahnya positif sebesar 0,319 dengan signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berkontribusi positif terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dengan kenaikan pendapatan asli daerah diikuti dengan kenaikan belanja modal guna pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik maupun pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aditiya dan Dirgantari (2017) yang mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat dan Purniawati (2018) yang menyimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

3. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum adalah “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. “DAU merupakan bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) yang memiliki fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah” (Saragih, 2003). DAU merupakan transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat “*block grant*” artinya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggunakan DAU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai koefisiensi regresi yang arahnya positif sebesar 0,425 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berkontribusi positif terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang mengatakan dana alokasi umum berkontribusi positif terhadap belanja modal terdukung. Hal ini dapat disebabkan oleh kewenangan pemerintah daerah untuk mengalokasikan DAU guna memenuhi kebutuhan belanja daerah. Kenaikan DAU setiap tahunnya

yang juga diikuti dengan kenaikan belanja modal maka dapat disimpulkan bahwa DAU dialokasikan pemerintah daerah untuk belanja modal guna memenuhi kebutuhan infrastruktur dan peningkatan pos layanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain daripada itu jumlah dana alokasi umum juga terbilang besar dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurzen & Riharjo (2016) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) yang menyimpulkan bahwa variabel DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini jga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajrina dan Suzan (2015) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

4. Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (23) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai koefisiensi regresi yang arahnya positif sebesar 0,030 dengan signifikansi sebesar $0,637 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berkontribusi terhadap belanja modal.

Pada hipotesis keempat (H_4) yang mengatakan dana alokasi khusus berkontribusi positif terhadap belanja modal tidak terdukung. Hal ini dapat disebabkan oleh fungsi pengalokasian DAK mengarah pada kegiatan khusus dan menjadi prioritas nasional disisi lain menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 menerangkan bahwa adanya DAK non fisik dibidang kesehatan. Sedangkan belanja modal mengarah pada pembangunan fisik yang memiliki umur ekonomi lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto dan Handayani (2016) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raini dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Khasanah dkk (2016) menyimpulkan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

5. Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dari tabel 4.7 diatas menunjukkan nilai F sebesar 12,021 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang mengatakan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berkontribusi positif terhadap belanja modal terdukung.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013) Secara simultan Petumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian Dewi & Suyanto (2016) pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.